

# PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI DESA WISATA KECAMATAN HARIARA POHAN, SAMOSIR

Demak Johanna Gurning<sup>1\*</sup>, Jhon Henri Sinaga<sup>2</sup>, Melati Sitorus<sup>3</sup>, Novita Safriani Ginting<sup>4</sup>, Resna Napitu<sup>5</sup>, Risma Nurhaini Munthe<sup>6</sup>, Taufik Parinduri<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fak. Ekonomi, Universitas Simalungun  
<sup>5,6,7</sup> Universitas Simalungun

## Article history

Received : 27 Mei 2022

Revised : 30 Mei 2022

Accepted : 13 Juli 2022

## \*Corresponding author

Demak Johanna Gurning

Email :

demakjohannagurning@gmail.com

## Abstrak

Dalam memulai usaha desa wisata, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama, pendirian desa wisata itu sendiri merupakan operasi masyarakat, sehingga keberadaannya tentu akan mampu mensejahterakan masyarakat desa. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diberikan dalam bentuk pelatihan pengelolaan keuangan di tempat wisata di Desa Hariara Pohan Pulau Samosir. Pelatihan ditujukan kepada aparat desa khususnya bagian keuangan bidang Pariwisata Holbung di Desa Hariara Pohan. Masalah dengan jenis PKM ini adalah bahwa banyak program berbasis desa membutuhkan tanggung jawab pelaporan yang jelas, akuntabel, dan tepat waktu. Tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang pelaporan keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memberikan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah agar aparat keuangan dan kepala desa Hariara Pohan memahami pengelolaan keuangan, menyusun laporan keuangan dengan benar, dan mencatatnya tepat waktu.

Kata Kunci: Desa Wisata, Laporan Keuangan

## Abstract

*In starting a Tourism Village Business, sound financial management is needed. As we all know, the establishment of the tourist village itself is a community operation, so its existence will undoubtedly be able to prosper the village community. Community service (PKM) is given as financial management training in Hariara Pohan Village Samosir Island tourist attractions. The training was aimed at village officials, especially the Finance Department of Holbung tourism in Hariara Pohan Village. The problem with this type of PKM is that many village-based programs require transparent, accountable, and timely reporting responsibilities. This village financial management training activity aims to provide sufficient knowledge about Village Financial Reporting under applicable accounting standards and provide training on preparing financial statements. The result of this service activity is that the financial apparatus and the head of Hariara Pohan village understand financial management, prepare financial statements correctly, and record them on time*

Keywords: Tourism Village, Financial Statements

Copyright © 2022 Demak Johanna Gurning, Jhon Henri Sinaga, Melati Sitorus, Novita Safriani Ginting, Resna Napitu, Risma Nurhaini Munthe, Taufik Parinduri

## PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu wakil dari pengembangan pariwisata masyarakat (Darmayanti et al., 2020). Gagasan pengembangan pariwisata tetap menjadi topik hangat di media, serta dalam studi dan kerja sukarela yang dilakukan oleh LSM dan Universitas. Pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan pedesaan dapat dipercepat dengan tujuan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan pariwisata di sana melalui penciptaan komunitas wisata. Salah satu strategi yang diupayakan pemerintah untuk mencapai 2.000 desa wisata tersebut adalah dengan percepatan pembangunannya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam wawancaranya mengatakan 2000 desa memiliki potensi sebagai desa wisata (CNN Indonesia, 2017). Nuryanti, (1993) berpendapat desa wisata merupakan suatu bentuk yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Hidayatullah & Suminar, (2021) juga berpendapat bahwa desa wisata berdiri dengan tujuan memantapkan masyarakat agar mampu berkontribusi langsung dalam mempersiapkan diri dan menyadari peluang untuk menangkap manfaat yang mungkin timbul dari pengembangan kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa wisata yang didirikan.

Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, karena merupakan unit terkecil dalam negara yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, rencana dan program pemerintah dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta dapat didistribusikan dengan cepat dan tepat sasaran. Dimana desa merupakan suatu tempat bermukim banyak orang yang hidup bersama, memiliki adat dan aturan, dan memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan.

Sebagian besar bagian dari dana desa disalurkan dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Boedijono et al., 2019). Dana tersebut diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Apapun prioritas dana desa tersebut berdasarkan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya melalui;

1. Pengutamaan dana desa untuk kebutuhan dasar, seperti pembangunan dan pengembangan pos kesehatan; posyandu; serta PAUD
2. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa
3. Dana desa diutamakan untuk kenaikan daya ekonomi lokal, peningkatan kewirausahaan masyarakat desa, kenaikan pendapatan dan pelebaran skala ekonomi masyarakat desa.

Dalam membangun masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, desa saat ini perlu mengalami berbagai bentuk pembangunan untuk menjadi desa yang lebih maju dan berdaya secara finansial. Dalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan daya ekonomi, desa memiliki kekuatan untuk menguasai wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat. Proses pengembangan, yang memerlukan strategi, eksekusi, dan tanggung jawab, merupakan elemen penting lainnya. Pembangunan tersebut hendaknya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagaimana perwujudan dari sila Pancasila demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera (Arina et al., 2021). Pelaksanaan pembangunan desa ini harus sesuai rencana dan masyarakat memiliki akses untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan tersebut.

Jamun, 2020 mengatakan bahwa dana desa perlu pengawasan dari banyak pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Bila pengawasan tidak dilakukan dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan baik dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan sampai pelaporannya. Menurut pendapat Sujarweni, (2015) akuntansi desa adalah proses pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga menghasilkan output informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan semua pihak yang berhubungan dengan Desa. Dengan akuntansi keuangan desa, dana desa digunakan untuk memelihara operasional desa, dan alokasi dana desa dan uang lainnya dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang serta semua produk dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memastikan tingat efisiensi, kebijakan dan kejujuran (Mardiasmo, 2009). Pemerintah Kecamatan Hariara Pohan mengadopsi gagasan otonomi daerah di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan berupaya memaksimalkan potensi desa dengan mengalokasikan uang desa

dalam APBD yang diterima dari APBN. Akuntabilitas sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa berkat akses informasi keuangan (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Hariara Pohan merupakan sebuah desa wisata yang terletak di tepi Danau Toba, tepatnya di kecamatan Hariara Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Daya tarik utama desa ini adalah Bukit Holbung Samosir yang menawarkan pemandangan alam yang indah berupa pemandangan Danau Toba. Dari dana desa yang terkumpul, jika dikelola dengan baik, potensi ekonomi (dari pariwisata) tentu bisa meningkat. Untuk itu, dana desa harus dikelola oleh banyak pihak dengan tepat dan benar. Namun demikian, diperlukan juga upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan kerja kepala desa dan pengelola keuangan yang bertanggung jawab mengelola keuangan di tingkat desa. Salah satu kegiatan tersebut antara lain edukasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan desa atas dana yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) kami menyadari perlunya memberikan pelatihan tentang cara menyusun laporan keuangan Dana Desa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembuatan catatan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya sangat penting untuk membangun akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelatihan ini menyasar pengelola keuangan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara desa Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir. Kegiatan direncanakan melalui kegiatan pelatihan dan diskusi terkait penyusunan laporan keuangan.

Namun kenyataannya, pengelolaan keuangan di desa ini masih mengalami kendala. Ini adalah aki-bat dari kekurangan sumber daya dan staf. Ketersediaan peralatan di desa menjadi kendala pertama. Kemampuan sumber daya perangkat desa dalam kaitannya dengan penyelesaian administrasi. Kedua, ada banyak keadaan tak terduga. Situasi yang mungkin muncul secara tidak terduga, seperti keadaan cuaca. Saat membangun jalan di pemukiman yang hancur, cuaca mungkin memberikan tantangan. Akibatnya, terkadang tugas tidak selesai tepat waktu. Ketiga, pendampingan masyarakat desa. Stagnasi keuangan pada entitas publik di atas tingkat desa adalah elemen keempat dan penghalang untuk mendistribusikan uang di tingkat desa. Ini mengarah pada pembangunan yang tidak dimaksudkan. Unsur pemerintah berada di urutan kelima. Menurut aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, masalah pelaporan dana desa bergeser dari tahun ke tahun. Masalah pelaporan dapat terjadi akibat modifikasi tersebut. Perangkat desa bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, dan kader desa senantiasa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Keenam, kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa tentang perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kemampuan kepala desa dan perangkatnya bukanlah faktor utama dalam mengelola keuangan tersebut. Tapi itu membutuhkan partisipasi banyak pemangku kepentingan desa (Boedijono et al., 2019).

Kendala-kendala itu tentu tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi saat ini pemerintah pusat dan daerah sedang fokus pada pemerintah desa dan banyak program berbasis desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang membutuhkan transparansi, akuntabel, laporan pertanggungjawaban dan ketepatan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diberikan pelatihan dan pendampingan teknis guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa khususnya bagian keuangan dalam pengelolaan akuntansi keuangan di desa ini.

Berikut ini adalah tujuan dari pelatihan pengelolaan keuangan desa di Desa Hariara Pohan dalam konteks ini:

1. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Kedepannya diharapkan dapat terjalin kerjasama yang lebih erat agar dapat menguntungkan kedua belah pihak
3. Memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat tentang cara penyusunan laporan keuangan Dana Desa

## **METODE PELAKSANAAN**

Program pelatihan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan ini dilaksanakan di Desa Hariara Pohan tepatnya di ruang rapat kantor Kepala Desa Hariara Pohan pada Senin, 7 Maret 2022 pukul 10.00 WIB s/d selesai. Berikut teknik yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini:

### **1. Tahap I Persiapan dan Pelatihan**

Sebelumnya ada tahap Pra-Pelaksanaan kegiatan. Tim PKM mengevaluasi lokasi dan menjalin kontak awal dengan mitra, khususnya Ibu H. Sitanggang, yang menjabat sebagai sekretaris kepala Desa Hariara Pohan. Hasil wawancara meningkatkan pemahaman tim pengabdian tentang masalah-masalah khas yang dihadapi oleh pengelola keuangan dana desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pencatatan keuangan. Pelatihan dilakukan dengan 5 sesi. Sesi pertama pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Pembicara pada sesi kedua membahas tentang standar yang harus diikuti dalam membuat laporan keuangan. Peserta belajar bagaimana menyusun log ketika ada transaksi selama sesi ketiga. Peserta sesi keempat mendapatkan penjelasan tentang dasar pembukuan. Peserta menerima instruksi tentang cara menyajikan catatan atas laporan keuangan secara metodis selama sesi kelima.

### **2. Tahap II Diskusi dan Pemecahan Masalah**

Kesempatan untuk mendiskusikan masalah sebelumnya yang mereka miliki dengan pembuatan laporan keuangan diberikan kepada peserta pelatihan. Pekerjaan ini akan memakan waktu satu jam.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Pra-pelaksanaan berjalan lancar tanpa hambatan. Dengan meninjau lokasi dan berkomunikasi dengan calon mitra, khususnya Ibu H. Sitanggang, sekretaris Kepala Desa Hariara Pohan, menjadi jelas bahwa mitra memiliki masalah dengan pengelola keuangan dana desa, terutama yang melibatkan pengelolaan dan pencatatan keuangan. Terlebih dalam penyusunan laporan keuangan mereka belum sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan akuntansi berstandar umum. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Hariara Pohan untuk waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan. Tim kemudian mendesain materi pelatihan yang akan dipaparkan. Saat menyampaikan materi, pemateri memberikan motivasi akan pentingnya kemampuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan yang memerhatikan beberapa asas seperti transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Kegiatan Pelatihan pengelolaan keuangan ini dilaksanakan pada Senin, 7 Maret 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Hariara Pohan. Jumlah perangkat desa yang hadir dalam kegiatan pelatihan ini sebanyak 10 orang, 19 orang mahasiswa peserta pengabdian dan beberapa masyarakat setempat. Kegiatan pelatihan yang dilakukan di ruang rapat kantor kepala desa ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan metode yang sudah di susun. Beberapa tahapannya sebagai berikut :

### **Tahap I Persiapan dan Pelatihan**

Sesi pertama, dimulai dengan pemateri memberikan pertanyaan kepada kepala pengelola keuangan yang bertanggungjawab di bidang Pariwisata Holbung Kec. Hariara Pohan, yaitu Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di bidang Pariwisata Holbung saat ini. Sesi kedua, pemateri menjelaskan standar yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan. Pada sesi ini peserta dijelaskan standar akuntansi keuangan sektor publik. Kebutuhan Standar Akuntansi Publik merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar

akuntansi sektor publik juga merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintahan Indonesia menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut standar akuntansi pemerintahan (SAP). Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Menetapkan standar mungkin menguntungkan satu pihak, tetapi mungkin juga berbahaya bagi pihak lain.

Ketika menetapkan standar akuntansi, sejumlah faktor harus diperhitungkan, termasuk: 1. Standar ini menawarkan rekomendasi tentang informasi apa yang harus dimasukkan dalam laporan kondisi keuangan, kinerja, dan aktivitas organisasi untuk semua konsumen informasi. 2. Standar memberikan auditor prinsip dan norma perilaku yang memungkinkan pengujian teliti dan independen ketika menggunakan pengetahuan dan integritas mereka untuk mengaudit laporan organisasi dan untuk menunjukkan masuk akal mereka. Sesi ketiga, peserta diberikan penjelasan cara menyusun jurnal ketika ada transaksi. Sesi keempat, peserta diberikan penjelasan mengenai pembukuan sederhana. Proses pencatatan keuangan yang berlangsung di perusahaan atau bisnis yang kita jalankan adalah pembukuan.

Penyelesaian pembukuan ini sangat penting untuk penilaian kami terhadap pertumbuhan bisnis kami dan untuk menentukan apakah kami mendapat untung atau rugi. Cara lain untuk memikirkan pembukuan adalah sebagai kompas atau panduan bagi kita saat kita menjalankan perusahaan. Kita membutuhkan akuntansi, fungsi dasar dari akuntansi itu sendiri, sebagai bagian dari proses pembukuan sehingga kita dapat : (1) Apakah perusahaan kita menguntungkan atau sebaliknya? (2) Saat kita mengajukan permintaan pendanaan kepada investor atau bank, kita akan lebih percaya diri jika laporan keuangan kita kuat. Ada 4 (empat) langkah dalam proses pembukuan, antara lain: (1) Pencatatan: (a) Dalam Buku Kas, catat semua transaksi tunai, baik pemasukan maupun pengeluaran, (b) Simpan semua dokumentasi transaksi dan (c) Di akhir semester, bandingkan uang tunai dengan Buku Kas, (2) Pengelompokan: (a) Transaksi harus dikategorikan sebagai aset (aset) dan kewajiban (utang dan ekuitas), dan jumlahnya harus sesuai, (b) Jumlah uang dalam pembukuan harus sama dengan yang ada di Buku Kas, (c) semua transaksi harta akan mempengaruhi kas, (d) pengeluaran, (e) Modal akan berkurang karena bahan baku, perlengkapan, peralatan, dan sewa disesuaikan, (3) Ikhtisar/Penjabaran, penyusunan Laba Rugi ,(4) Saat menyiapkan neraca untuk pelaporan, aset dan kewajiban disertakan (Kekayaan harus sama dengan Hutang dan Ekuitas). Dan sesi kelima, peserta diberikan penjelasan cara membuat sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan



**Gambar 1. Tim penulis memaparkan materi kepada perangkat desa dibidang pariwisata di Desa Hariara Pohan beserta beberapa masyarakat setempat**

### **Tahap II Diskusi dan Pemecahan Masalah**

Peserta atau masyarakat di desa ini menunjukkan antusiasnya selama kegiatan pelatihan berlangsung. Menyalurkan pendapat dan bertanya mengenai materi yang disampaikan serta aktif dalam forum diskusi. Dalam pembahasan sebelumnya sudah diketahui beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat atau

pemerintah desa dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, diskusi diadakan untuk menentukan tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah saat ini. Kendala pertama adalah faktor sumber daya peralatan desa. Kemampuan sumber daya perangkat desa dalam kaitannya dengan penyelesaian administrasi. Menyusul terpenuhinya tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, terdapat tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dana desa yang tidak dapat dihindari. Kedua, ada banyak keadaan tak terduga. Peristiwa tak terduga yang bisa terjadi, termasuk kondisi cuaca. Saat membangun jalan di pemukiman yang hancur, cuaca mungkin memberikan tantangan. Akibatnya, terkadang tugas tidak selesai tepat waktu. Ketiga, pendampingan masyarakat desa.

Masyarakat desa berperan dalam pengelolaan dana desa selain perangkat desa dan pemerintah. Khususnya dalam rapat desa. Penggunaan dan penatausahaan pendapatan desa memerlukan keterlibatan masyarakat. Faktor keempat adalah kendala pencairan dana di tingkat desa, yaitu stagnasi dana di lembaga publik di atas tingkat desa. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Kelima adalah faktor pemerintah. Menurut aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, masalah pelaporan dana desa bergeser dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dapat menyebabkan masalah saat pelaporan. Aparat desa harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada dan aparat desa melapor ke pemerintah pusat. Keenam, kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah desa.

Keterbatasan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan desa dapat diatasi secara bertahap melalui pelatihan yang terus menerus dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pelatihan, sebagian besar pelaku perangkat desa dapat menyusun laporan keuangan desa dan memahami setiap aspek akuntansi pasca keuangan. Pemerintah pusat yang saat ini sangat berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan transparansi dituntut untuk mempertanggungjawabkan dana desa, sehingga hal ini erat kaitannya. Untuk itu perlu terus dilakukan edukasi kepada aparat desa mengenai aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dimanfaatkan secara efisien dan intensif, akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Untuk meminimalisir berbagai ketimpangan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan desa merupakan tujuan pembangunan. Selain itu, penggunaan keuangan desa harus diawasi dan diarahkan untuk mengurangi kesalahan dan menghentikan penipuan oleh oknum yang ceroboh. Diharapkan bahwa modifikasi pada dasar pencatatan dan pemrosesan dana ini akan memiliki efek implementasi yang menguntungkan.

Luaran yang diharapkan dari hasil pengabdian ini berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ber-ISSN dan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat desa dan peran masyarakat dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan desa.



**Gambar 2. Tim penulis berfoto bersama dengan Sekretaris Kepala Desa Hariara Pohan dan perangkat desa**

## KESIMPULAN

Kegiatan pengajaran manajemen keuangan dan pembuatan laporan keuangan di Desa Hariara Po-han berjalan lancar. Acara ini diikuti dengan antusias oleh semua peserta, dan mereka semua percaya bahwa pelatihan telah membantu kemajuan bisnis desa wisata mereka. Latihan ini menjadi dasar bagi pengelola keuangan desa untuk mengadopsi standar akuntansi sektor publik dan praktik pengelolaan keuangan desa. Pelajari tentang manajemen dokumen untuk perangkat desa, terutama untuk catatan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan desa. Mendidik warga Desa Hariara Pohan tentang dasar-dasar pembukuan dan pelaporan keuangan akan memungkinkan masyarakat untuk menafsirkan laporan keuangan desa dan meminta pertanggungjawaban perangkat desa.

## PUSTAKA

- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 22(3), 22–41.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35490/33209>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- CNN Indonesia. (2017). Kemendes PDTT Sebut 2.000 Desa Berpotensi Wisata. *CNN Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170522130218-307-216367/kemendes-pdtt-sebut-2000-desa-berpotensi-wisata>
- Darmayanti, P. W., Oka, I. M. D., & Sukita, I. W. (2020). PENGEMBANGAN DESA WISATA KABA-KABA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT LOKAL. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 11(1), 15–23.  
<https://doi.org/10.22334/jihm.v11i1.173>
- Hidayatullah, F. A., & Suminar, T. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Lifelong Education Journal*, 1(1), 1–11.  
<https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej/article/view/4>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). PERAN KOMITMEN, KOMPETENSI, DAN SPIRITUALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Mardiasmo, D. M. (2009). Akuntansi sektor publik: Yogyakarta: Andi
- Nuryanti, W. (1993). Concept, Perspective and Challenges, Makalah Bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya
- Sujarweni, V. (2015). Akuntansi Biaya. Cetakan Pertama. Yogyakarta. In: Pustaka Baru press

**Format Sitasi:** Gurning, D.J., Sinaga, J.H., Sitorus, M., Ginting, N.S., Napitu, R., Munthe, R.N., Parinduri, T. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan di Desa Wisata Kecamatan Hariara Pohan, Samosir. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 3(2): 795-805. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.2008>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))